

15DES

EDISI DESEMBER



KALBAGTIMES

K A L B A G T I M T I M E S

NEW GAME

Sudoku

NEW HEADLINE

Menkeu Terima Penghargaan
Visionary Award

NEW INFO

Capaian Penerimaan
Kilas Kalbagtim



KATA PENGANTAR



Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga,
Basengat Ka' Jubata

Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan buletin KALBAGTIMES yang terbit setiap tanggal 15.

KALBAGTIMES terbit atas timbulnya rasa perlu untuk memberikan informasi terkini seputar kantor untuk menambah pengetahuan pegawai di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.

Semoga dengan adanya KALBAGTIMES mampu meningkatkan motivasi kinerja pegawai dalam menciptakan inovasi dan ide-ide lainnya demi kemajuan instansi.

Akhir kata, selamat membaca cless!!!

KONTAK

humas.kwbckalbagtim@gmail.com

MEDSOS

@BCKanwilkalbagtim / instagram

@BCKanwilkalbagtim / FB

@BCKanwilkalbagtim / Twitter

WEBSITE

www.beacukaikalbagtim.com



KALBAGTIMES

KALBAGTIM TIMES

DITERBITKAN OLEH

KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

PELINDUNG

KUKUH SUMARDONO BASUKI

PENANGUNG JAWAB

ERWINDRA RACHMAWAN

PEMIMPIN REDAKSI

WIDYO TUTUKO

REDAKTUR / ARTIKEL

VAHRI FIRMANSYAH

ANGGREINI DINDA LARASATI

EDITOR / DESAINER

TINNO AKHBAR AJI SAKTI

FOTOGRAFER

TINNO AKHBAR AJI SAKTI

Daftar Isi

1 **Headline**

- Menkeu terima penghargaan Visionary Award dari US - ASEAN Business Council

2 **Seputar Kantor**

- Penandatanganan kerjasama Joint Program Pajak-BC
- Workshop Kehumasan Fotolistik
- Pemberian Fasilitas KB PT.PSS
- Penilaian dan Evaluasi dalam meraih predikat WBK
- Audisi Pegawai Teladan

9 **Capaian Penerimaan**

- BM, BK, Cukai, PDRI

10 **Kilas Kalbagtim**

- Berita Di Lingkup Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim

12 **Customs New Regulation**

- Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 2022

15 **Artikel**

- Sustainable Financing dan Sektor Keuangan

16 **FYI**

- Peringatan Hakordia Menkeu Paparkan Tiga Nilai Penting Tumbuhkan Budaya Antikorupsi

18 **Bonus**

- Sudoku

Menkeu Terima Penghargaan Visionary Award dari US - ASEAN Business Council

Jakarta, 13/12/2021 Kemenkeu - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terima penghargaan Visionary Award dari US - ASEAN Business Council berkat kontribusi dan dedikasinya menjaga dan meningkatkan performa ekonomi Indonesia. Menurut US - ASEAN Business Council, semasa masa kerjanya dari tahun 2005 dan 2010, Menkeu terbukti berhasil memperkuat ekonomi Indonesia melalui penguatan investasi dan pengelolaan ekonomi saat terjadi krisis keuangan tahun 2007-2008 dan 2014. Bahkan sekarang pun saat pandemi Covid-19, Menkeu disebut melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia.

"Saya sangat merasa terhormat dan bersyukur telah dipilih sebagai penerima Visionary Award pada US - ASEAN Business Council Award 2021. Kerja sama strategis yang telah dipelihara dengan sangat baik, ke depan akan semakin kuat karena kita akan bersama-sama memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19," ucap Menkeu saat menerima penghargaan secara virtual, Minggu (12/12).



Tariq Mahmud, Group Country Manager for Regional Southeast Asia for Visa, turut memberikan testimoni atas kinerja Menkeu yang sangat baik. Menurutnya, dalam masa baktinya sebagai pejabat publik, Menkeu terus berjuang untuk Indonesia dalam masa-masa sulit ekonomi global. Dari kepemimpinannya yang kuat, hubungan kerja sama Indonesia dan US telah memberikan dampak positif. Tariq pun menyampaikan dukungannya untuk Presidensi G20 2022 yang dipegang oleh Indonesia.

Selanjutnya, mantan duta besar US untuk Indonesia, Bob Blake juga mengatakan Menkeu telah berhasil mewujudkan berbagai inisiatif untuk

memajukan ekonomi Indonesia. Berbagai upaya reformasi perpajakan, termasuk terbaru pajak karbon yang akan meningkatkan iklim bisnis untuk US. Lainnya, pembentukan LPDP yang telah membuat anak-anak Indonesia bisa meraih pendidikan di universitas terbaik di US dan di negara-negara lain.

"Ini adalah testimoni yang sangat kuat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Melalui berbagai kebijakan maupun Presidensi G20 2022, Indonesia yang akan memfokuskan 6 agenda prioritas pada jalur keuangan bertujuan untuk memperkuat aksi kolektif global. Dengan begitu diharapkan dapat tercapai pemulihan ekonomi dunia bersama dan pemulihan ekonomi yang lebih kuat," tutup Menkeu.



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
Joint Program
Kanwil DJP Kaltimara - Kanwil DJBC Kalbagtim
Balikpapan, 25 ovember 2021

Pada tanggal 25/11/2021 Kanwil DJBC Kalbagtim melaksanakan penandatanganan MOU dengan Kanwil DJP Kaltimara. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bapak Max Darmawan selaku Kepala Kanwil DJP Kaltimara, dan Bapak Kukuh Sumardono Basuki selaku Kepala Kanwil DJBC Kalbagtim disaksikan oleh jajaran masing-masing. Joint Program ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai dengan membentuk sebuah Tim Implementasi Program Sinergi Reformasi DJP dan DJBC . Tim tersebut bertugas untuk menetapkan rencana kerja dan evaluasi, berkomunikasi dengan pihak- pihak terkait serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan secara berkala kepada penanggung jawab .Dengan adanya Joint Program diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serta sinergi yang baik antara Kanwil DJP dan Kanwil Bea Cukai dalam tugas pengawasan atas kepatuhan di bidang Perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai untuk mengamankan hak- hak keuangan negara serta menjawab berbagai tantangan global demi mewujudkan kondisi perekonomian yang ideal.



WORKSHOP KEHUMASAN FOTOLISTIK

Tingkatkan kompetensi, Bea Cukai Kalbagtim adakan workshop kehumasan

Balikpapan (15/12) - Bea Cukai Kalbagtim menggelar workshop kehumasan secara hybrid di Aula Kanwil Bea dan Cukai Kalbagtim dengan tema Fotolistik "Fotografi dan Jurnalistik". Menghadirkan narasumber Founder dari Matanesia dan profesional fotografer, Mamuk Ismantoro.

Acara hybrid ini diikuti oleh tim humas dilingkungan Kanwil Bea dan Cukai kalbagtim yang hadir secara tatap muka dan seluruh pegawai DJBC seluruh Indonesia secara daring. Tak hanya materi, para peserta juga berkesempatan untuk praktek secara langsung. Narasumber menegaskan pentingnya pengemasan yang tepat dari sisi angle berita, konten, maupun foto menjadi perhatian pembaca.

Diharapkan dengan adanya workshop ini dapat meningkatkan keterampilan dibidang kehumasan khususnya fotografi dan jurnalistik



Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat PT. PSS

Sebagai salah satu pemenuhan syarat pemberian fasilitas Kawasan Berikat, PT Perindustrian Sawit Synergi (PT PSS) melakukan pemaparan proses bisnis dimulai dari profil usaha perusahaan, proses produksi, running live IT Inventory & CCTV, dampak ekonomi maupun program CSR pendirian perusahaan.

Presentasi dilakukan secara hybrid, dengan pertemuan tatap muka dihadiri Kepala Kanwil DJBC Kalbagtim-Kukuh Sumardono Basuki, Kepala KPPBC Sangatta-Benny Wismo, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan-Erwindra Rachmawan, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai-Dwi Agus Prasodjo, Kasi pada Bidang P2 dan jajaran Direksi PT PSS. Sedangkan partisipasi secara online dihadiri oleh KaKanwil DJP Kaltim-Max Darmawan, Kabid PPIP, Kabid DP3 dan Kepala KPP Pratama Bontang yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Kutai Timur, lokasi rencana pendirian pabrik refinery nantinya.

Diskusi berlangsung secara interaktif antara pihak DJP-DJBC dengan pihak PT PSS, dan setelah break out session Kepala Kanwil DJBC Kalbagtim menyatakan bahwa PT PSS telah memenuhi syarat untuk diberikan fasilitas Kawasan Berikat. Ini merupakan pengusaha Kawasan Berikat ke empat yang bergerak di bidang Refinery CPO dari 20 pengusaha TPB pada lingkup Kanwil DJBC Kalbagtim. Dengan pendirian Kawasan Berikat pertama di bawah koordinasi KPPBC Sangatta diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal meningkatkan penerimaan negara melalui Bea Keluar, pajak maupun PNPB. Lebih utamanya, akan dapat menggerakkan laju perekonomian daerah.



Penilaian dan Evaluasi dalam meraih predikat WBK

Perjalanan BC Kalbagtim dalam upaya mendapatkan predikat Kantor Wilayah Bebas Korupsi (WBK) terus berlanjut. Pada hari ini dilaksanakan kegiatan Field Evaluation Pendalaman WBK yang dilaksanakan oleh Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Pada kesempatan tersebut Kukuh Sumardono Basuki selaku Kepala Kantor menjelaskan bahwa sudah banyak kemajuan dan inovasi yang dilakukan seperti pembangunan komitmen integritas para pegawai dan pembentukan tim agen perubahan sebagai penggerak pembangunan WBK. Selain itu area perubahan juga dilaksanakan atas penataan tata laksana organisasi, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan pelayanan publik. Setelah kegiatan ini dilaksanakan diharapkan bahwa BC Kalbagtim dapat meraih hasil yang optimal yaitu predikat WBK sebagai parameter kantor yang terus berkembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya



Audisi Pegawai Teladan

Balikpapan (11/11)- Bea Cukai Kalbagtim mengadakan audisi pegawai teladan dalam rangka Hari Anti Korupsi tahun 2021. Seluruh pegawai melakukan voting sehingga ada 3 kandidat yang terpilih. Laila Naimatul Muthoharoh (Kepatuhan Internal), Muhammad Alfaridzi (Perizinan dan Fasilitas I) dan Dafrizal Resvaldhy (Rumah Tangga). Acara dihadiri Kepala KWBS Kalbagtim Bapak Kukuh Sumardiono Basuki dan para pejabat lainnya sebagai dewan juri. Setiap kandidat menyampaikan visi dan misinya apabila terpilih menjadi pegawai teladan. Dimulai dari Laila yang mempunyai harapan dapat menjadi role model bagi pegawai lain dalam mendukung tujuan organisasi. Selain itu juga menjalankan peran sebagai pegawai, istri dan ibu secara seimbang. Dafrizal menyampaikan gagasan akan mengedepankan pelayanan prima dan inovasi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Hal ini mengcapture keseharian dafrizal yang sigap dan responsif saat membantu pegawai yang terkena COVID beberapa saat lalu. Kandidat ketiga Faridz tak kalah bersemangat dengan terus menggali potensi diri dan memberikan yang terbaik demi kemajuan organisasi. Tegas dalam menolak gratifikasi menjadi ciri khas Faridz dalam bekerja. Menurut dewan juri setiap kandidat sangat layak menjadi pegawai teladan, ketiganya sudah memberi performa terbaik bagi unit masing masing.

Monitoring Capaian Penerimaan

s.d 31 Oktober 2021

PDRI

PPN 2.974.966.056.690

PPnBM 141.736.000

PPH 568.450.601.905

PPH pasal 22 Ekspor 1.290.190.730.440

PPN HT/DN 538.805.714.000

TOTAL PDRI 5.372.554.839.035

➔ Bea Masuk

Targt : 504.033.303.000

Tercapai : 770.937.872.688 (152,95%)

➔ Bea Keluar

Targt : 17.786.542.000

Tercapai : 2.565.455.741.872 (14.423,58%)

➔ Cukai

Targt : 252.125.000

Tercapai : 602.723.480 (239,06%)





BEA CUKAI BALIKPAPAN

BC BALIKPAPAN-Bea Cukai Balikpapan bersama instansi-instansi terkait mengadakan sebuah forum diskusi yaitu Focus Group Discussion (FGD) tentang Ekspor Produk Hasil Laut. Dihadiri oleh para peserta yang mayoritas adalah Pelaku Usaha Produk Perikanan, Bapak Firman Sane Hanafiah selaku Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan hadir langsung sebagai moderator. Dengan adanya Focus Group Discussion ini, diharapkan dapat menjawab isu serta

permasalahan terkait regulasi Ekspor Produk Hasil Laut ke Cina, serta semakin mendorong Ekspor Produk Perikanan di Kalimantan Timur

BEA CUKAI SAMARINDA

BC SAMARINDA - Telah dilaksanakan Sosialisasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Sosialisasi Aplikasi BACK'S dan Penghargaan Customs Award Bea Cukai Samarinda 2021. Acara bertempat di Ballroom Hotel Mercure. yang dihadiri oleh 60 tamu undangan yang terdiri dari perwakilan Eksportir, Importir, PPJK serta Penyelenggara Kawasan Pabean. Pada kesempatan yang sama diperkenalkan pula layanan online pengurusan pemuatan barang curah sebelum PEB dalam Aplikasi Bea Cukai Samarinda (BACK'S Online) yang memudahkan



beragam proses birokrasi untuk mempercepat pelayanan. Layanan Online ini juga memberikan transparansi yang terukur terkait proses penyelesaian dokumen yang telah diajukan

BEA CUKAI TARAKAN

BC TARAKAN - Bertempat di Kantor Bandara Internasional Juwata Tarakan, telah dilaksanakan Pemusnahan Barang Hasil Penindakan BNNP KALTARA dan Bea Cukai Tarakan berupa Narkotika. Pemusnahan Barang Hasil Penindakan Berupa Narkotika ini adalah hasil tindak lanjut dari Kegiatan Press Release Narkotika pada (18/10) dengan Barang Bukti sebesar 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika Gol. I jenis sabu, berat brutto 2.946,98 (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan puluh delapan) gram yang yang bertempat di Halaman BNNP Kaltara.





BEA CUKAI BONTANG

BC BONTANG-Bea Cukai Bontang yang diwakilkan oleh Kepala Kantor, Handojo; Kepala Seksi KIP, Ari Winarno; serta Plt Kepala Seksi PKCDT, M. Habibi melakukan pertemuan dengan perwakilan PT. Badak LNG Bontang yang bertempat di Kantor Bea Cukai Bontang guna melakukan asistensi terkait rencana pendirian Pusat

Logistik Berikat di PT. Badak LNG Bontang. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.



BEA CUKAI SANGATTA

BC SANGATTA-Berlokasi di halaman belakang Kantor Bea Cukai Sangatta telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa BKC Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) illegal hasil penindakan periode 2020-2021. Bea Cukai Sangatta telah melakukan penindakan terhadap 40 (empat puluh) pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai,

berupa Hasil Tembakau sejumlah 200.240 batang, Minuman Mengandung Ethil Alkhol sejumlah 71 botol dengan total kerugian Negara sejumlah Rp 98.354.726,- yang didapat dari kegiatan penindakan di 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Timur.

BEA CUKAI NUNUKAN

BC NUNUKAN - Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Bea Cukai Nunukan mengadakan acara coffee morning "Ngobrol Pagi Bea Cukai Nunukan Bersama UKM Kabupaten Nunukan". Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, pukul 09.00 WITA diselenggarakan di sweetness cafe dengan pemaparan materi tentang ekspor serta fasilitas KITE IKM. Acara berlangsung secara meriah dengan tetap melaksanakan serta memperhatikan protokol kesehatan.



Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 2022

Dana Bagi Hasil CHT

Pemerintah terus meningkatkan dukungan terhadap Petani/Buruh Tani Tembakau serta Buruh Rokok

2021

 **25%**
Kesehatan

 **50%**
Kesejahteraan Masyarakat

- **15%** Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Peningkatan Keterampilan Kerja

- **35%** Pemberian Bantuan

(dapat dialihkan ke Bidang Kesehatan dalam anggaran telah melebihi kebutuhan daerah)

 **25%**
Penegakan Hukum
(tidak dapat dialihkan)

2022

 **25%**
Kesehatan

 **50%**
Kesejahteraan Masyarakat

- **20%** Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pembinaan Industri

- **30%** Pemberian Bantuan

(dapat dialihkan ke Bidang Kesehatan dalam anggaran telah melebihi kebutuhan daerah)

 **25%**
Penegakan Hukum
(dapat dialihkan ke Bidang Kesehatan dalam anggaran telah melebihi kebutuhan daerah)

Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Harga Jual Eceran Sigaret

*per Januari 2022

 Kenaikan tarif cukai rata-rata 12%, dengan kenaikan maksimal 4,5% untuk Sigaret Kretek Tangan.

Golongan	Tarif	Kenaikan	Minimal harga jual eceran (per batang)	Harga jual eceran (per bungkus /20 batang)
SKM I	985	13,9%	Rp1.905	Rp38.100
SKM IIA	600	12,1%	Rp1.140	Rp22.800
SKM IIB	600	14,3%	Rp1.140	Rp22.800
SPM I	1.065	13,9%	Rp2.005	Rp40.100
SPM IIA	635	12,4%	Rp1.135	Rp22.700
SPM IIB	635	14,4%	Rp1.135	Rp22.700
SKT IA	440	3,5%	Rp1.635	Rp32.700
SKT IB	345	4,5%	Rp1.135	Rp22.700
SKT II	205	2,5%	Rp600	Rp12.000
SKT III	115	4,5%	Rp505	Rp10.100

Keterangan :
SKM : Sigaret Kretek Mesin
SPM : Sigaret Putih Mesin
SKT : Sigaret Kretek Tangan

Peringati Hakordia,

Menkeu Paparkan Tiga Nilai Penting Tumbuhkan Budaya Antikorupsi

Jakarta, 08/12/2021 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terdapat tiga nilai penting untuk menguatkan integritas yang merupakan fondasi utama dalam rangka menumbuhkan budaya antikorupsi, yakni akuntabilitas, kompetensi, dan etika.

Sebagai institusi bendahara negara, Kementerian Keuangan ingin menjadi institusi yang terus menjaga integritas. Menkeu menegaskan seluruh jajarannya harus menumbuhkan budaya akuntabilitas, tidak hanya sekadar akuntabilitas dari aspek legalistik, tetapi pada sikap dan pengambilan keputusan.

“Akuntabilitas adalah pada sikap setiap hari. Pada saat Anda membuat keputusan, Anda tahu bahwa nanti Anda harus akuntabel terhadap keputusan tersebut. Waktu Anda menggunakan resources, Anda harus tahu bahwa resources ini adalah berasal dari uang negara, maka kita juga harus akuntabel,” kata Menkeu secara daring dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan 2021, Rabu (08/12).

Selain akuntabel, kompeten menggunakan amanah, kewenangan, dan berbagai resources yang ada menjadi nilai penting dalam mencegah terjadinya korupsi.



“Karena kita sering juga mungkin tidak korupsi, tapi juga tidak mencapai cita-cita karena tidak kompeten. Suatu proyek atau kegiatan yang tidak dilaksanakan, kewenangan maupun amanah yang diberikan yang tidak dilakukan secara kompeten. Mungkin dia tidak korup, tapi dia juga gagal mencapai tujuan,” ujar Menkeu.

Sementara, etika menjadi suatu sikap yang mengarahkan pada kepatutan dan pemahaman bahwa dalam membuat keputusan tidak boleh melibatkan konflik kepentingan.

“Jadi etika adalah more than legalistic. Itu adalah value yang inheren di dalam DNA kita dan itu juga menunjukkan seberapa peka kita terhadap persepsi masyarakat terhadap kewenangan dan dalam hal ini jabatan yang kita emban,” kata Menkeu.

Korupsi menjadi musuh yang sangat nyata dan penyakit yang luar biasa berbahaya. Oleh karena itu, Menkeu menekankan bahwa pentingnya integritas yang identik dengan harga diri dan kehormatan.

“Menjadi manusia dan profesional yang berintegritas bukan karena kita diminta oleh sistem, bukan karena kita diharapkan oleh orang lain, tapi itu adalah kebutuhan kita sendiri. Kita sendiri yang menginginkan bahwa integrity adalah identik dengan identitas kita sehingga ini akan makin memperkuat sistem di dalam Kementerian Keuangan dalam menjaga keuangan negara,” ujar Menkeu.

Sebagai penutup, Menkeu berharap seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga dapat terus menjaga dan memperbaiki sistem yang telah ada sehingga dapat memerangi korupsi setiap saat, di setiap kesempatan, di setiap posisi, dan di setiap situasi.

Tajuk Minggu Ini:

Sustainable Financing dan Sektor Keuangan

Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia berkepentingan untuk menyukseskan agenda Paris Agreement. Salah satu komitmen pada Paris Agreement adalah pembatasan emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Agar Indonesia mencapai NDC yang ditentukan, terdapat dua langkah yang perlu ditempuh yaitu menekan emisi karbon dan mitigasi kegiatan investasi dengan mempertimbangkan ekonomi hijau. Untuk menekan emisi karbon, salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan skema carbon pricing. Sebagaimana diketahui, emisi gas rumah kaca terjadi karena aktivitas kegiatan ekonomi yang menghasilkan limbah karbon. Agar efektif, perlu diinternalisasikan dengan menetapkan harga karbon dan membebarkannya kepada entitas bisnis sebagai penghasil limbah karbon. Dengan demikian, inisiatif tersebut akan mendorong perubahan dari kegiatan intensif karbon serta mengarahpada pengurangan emisigas rumah kaca.

Pada penghujung bulan Oktober lalu, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salahsatu tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Salah satu ketentuan baru dalam Undang-undang tersebut adalah pengaturan pajak karbon. Pengaturan mengenai pengenaan pajak karbon diperlukan dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian NDC, yaitu pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada tahun 2030. Target NDC tersebut diperhitungkan dengan menggunakan instrumen tertentu di antaranya adalah menggunakan instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

Selanjutnya, terkait dengan mitigasi kegiatan investasi, Pemerintah terus mendorong integrasi pembiayaan atas aktivitas ekonomi yang berbasis green investment di sektor keuangan, atau disebut sebagai sustainable financing. IMF mendefinisikan sustainable financing sebagai penggabungan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) ke dalam keputusan bisnis, pembangunan ekonomi, dan strategi investasi. Dengan demikian, sustainable financing berkaitan erat dengan pembiayaan pada sektor keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang mengatur dan pengawasi sektor keuangan mendefinisikan sustainable financing dalam POJK Nomor 51 Tahun 2017 sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, OJK juga menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 - 2019) yang berfokus pada peningkatan pemahaman, pengembangan kapasitas serta peletakan dasar regulasi bagi industri jasa keuangan.

Berbagai upaya mendorong pembiayaan berkelanjutan tersebut telah menunjukkan hasil positif. Misalnya, WWF Sustainable Banking Assessment (SUSBA) edisi IV di Singapura pada 21 September 2020 menempatkan Indonesia di posisi kedua dalam hal lingkungan, sosial, dan tata kelola dari 38 bank di kawasan ASEAN. Bank-bank di Indonesia dinilai unggul dalam hal pengungkapan integrasi ESG ke dalam strategi bisnis secara keseluruhan, kebijakan sektor spesifik, serta telah memiliki program peningkatan kapasitas untuk keuangan berkelanjutan. Sementara itu, sustainable financing di industri pasar modal khususnya emiten atau perusahaan publik belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Selanjutnya, OJK meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait, serta mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain. Ekosistem tersebut terdiri dari tujuh komponen yaitu kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi Kementerian/Lembaga, dukungan non- pemerintah, sumber daya manusia, dan awareness. Ekosistem tersebut diharapkan akan mempertemukan supply dan demand dari para pelaku di industri jasa keuangan. Dari sisi supply, industri jasa keuangan harus mampu meningkatkan reputasi dan daya saing, berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, sekaligus mampu meningkatkan literasi keuangan berkelanjutan kepada para nasabahnya. Dari sisi demand, diharapkan semakin banyak pelaku industri jasa keuangan yang sadar akan produk yang berwawasan lingkungan dengan dibuktikan dengan adanya sertifikasi atas produk yang dihasilkan industri tersebut.

Sebagai target utama dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan, implementasi sustainable financing tidak hanya akan mempengaruhi sektor keuangan, tetapi juga sektor riil. Meskipun konsep sustainable financing sudah lama dikenal secara global, namun dirasa masih relatif baru di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan kompetensi pelaku sektor keuangan menjadi penting untuk mendukung penerapan sustainable financing. Tentunya dari sisi demand, para praktisi dalam ekosistem sustainable financing akan mempertanyakan insentif ketika mereka membuat suatu produk yang berwawasan lingkungan. Secara teori, para pelaku usaha dimaksud akan kembali kepada prinsip ekonomi keempat dari Gregory Mankiw, yaitu *people response to incentive*. Apabila tidak ada insentif yang dianggap cukup bagus, maka mereka akan enggan mengikutinya. Sebagai contoh, aktivitas ekonomi hijau tentunya memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses ekonomi konvensional. Di sisi lain, insentif juga akan dipertanyakan dari sisi supply dalam ekosistem sustainable financing. Sebagai contoh, perbankan mempunyai target untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat sebagai core bisnisnya. Apabila pelaku usaha perbankan gagal menemukan calon debitur yang memerlukan pembiayaan yang sekaligus memiliki usaha berwawasan ekonomi hijau, maka bisnis perbankan akan mengalami risiko sebagai akibat banyak dana yang tidak tersalur ke masyarakat. Dampaknya, fungsi intermediasi perbankan di dalam perekonomian akan terganggu.

Sebagai penutup, di era digital seperti sekarang ini, peran sebagai lembaga yang menyalurkan pembiayaan tidak hanya dimonopoli oleh sektor perbankan. Akan tetapi, peran pasar modal serta lembaga non- bank seperti crowd funding digital dan juga juga peer to peer lending (P2PL) juga telah tumbuh dan menjadi sumber pendanaan alternatif di sektor keuangan. Oleh karena itu, menjadi sangat berat dan tidak adil bagi perbankan apabila hanya industri perbankan saja yang diharuskan menyalurkan pembiayaan dengan memperhatikan konsep ekonomi hijau demi mencapai target sustainable financing. Untuk itu, kewajiban mengimplementasikan ekonomi hijau dan sustainable financing seharusnya tidak hanya menjadi beban perbankan saja, namun juga menjadi tanggung jawab serta komitmen dari seluruh pelaku di industri jasa keuangan di Indonesia.

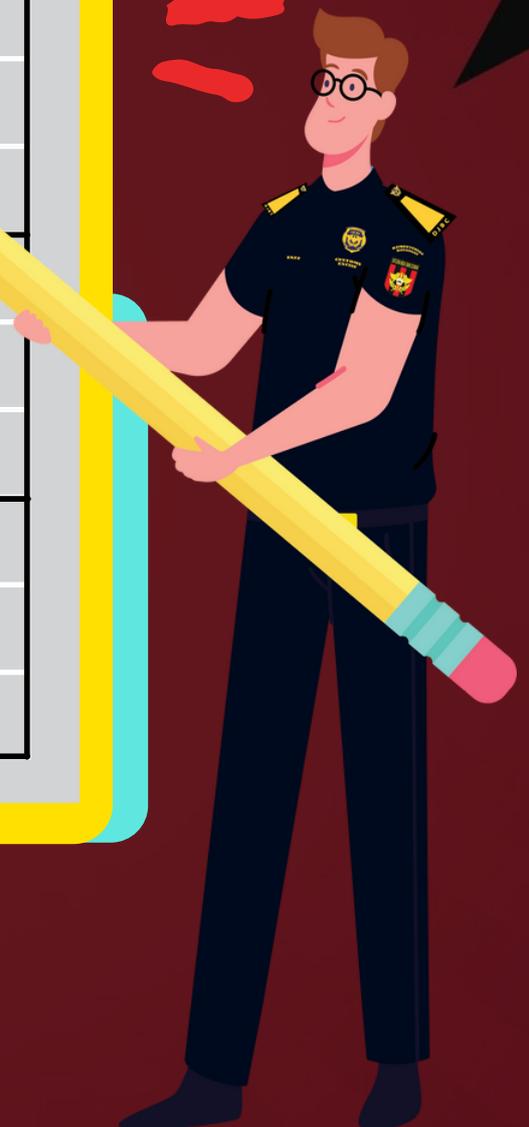
Source : Kementerian Keuangan - Badan Kebijakan Fiskal

QUIZ TIME!

SUDOKU



			2			8		
1			9			3		
8	3			7		6		
4					6	1		
3			7					9
		4		2				1
7			4					5
	2	8						



Ketentuan Kuis:

1. Wajib follow akun instagram @bckanwilkalbagtim
2. Jawaban kuis dan bukti telah memfollow akun instagram (dapat berupa foto atau screenshot) dikirim melalui alamat email humas.kwbckalbagtim@gmail.com
3. Jangan lupa sertakan nama terang
4. Pemenang yang beruntung akan diumumkan pada edisi selanjutnya
5. Pemenang adalah pengirim tercepat dengan jawaban yang tepat

Pemenang Bulan Lalu

1. Dedy Anugerah Rinaldy Adinegara
2. Juan Prakoso

Selamat kepada para pemenang tercepat !!